

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Selasa, 28 Agustus 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 9)	Selasa, 28 Agustus 2018	Jasa Marga Targetkan Tambah 200 KM Tol Baru	Pengembangan infrastruktur untuk menguatkan konektivitas jalur logistik
2	Investor Daily (Halaman, 6)	Selasa, 28 Agustus 2018	Tahun Ini, Dua Jembatan Layang di Riau Rampung	Saat ini tengah proses kontruksi
3	Investor Daily (Halaman, 6)	Selasa, 28 Agustus 2018	PUPR Susun Draf SPAM Regional Jatigede Rp 4 T	Dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha
4	Investor Daily (Halaman, 21)	Selasa, 28 Agustus 2018	Bappenas: Penegakan Hukum Tak Mengganggu Proyek Infrastruktur	Pelaksanaan proyek berlangsung terus
5	Kompas (Halaman, 16)	Selasa, 28 Agustus 2018	Berita Foto	Pengerjaan Jembatan Kenteng yang memiliki panjang 490 meter dan tinggi 39 meter di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/8)
6	Media Indonesia (Halaman, 15)	Selasa, 28 Agustus 2018	Asuransi Bencana Alam untuk Rumah	Kementerian PUPR masih melakukan verifikasi rumah yang rusak
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 28 Agustus 2018	Memutus Derita Jakarta & Cikampek	Kemacetan yang menakutkan antara Jakarta-Bandung
8	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 28 Agustus 2018	Berita Foto	Warga menjaring ikan di Bendungan Sungai Sampean, Bondowoso, Jawa Timur, Senin (27/8)
9	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Selasa, 28 Agustus 2018	Proyek Bendungan Tak Terganggu Gempa	Penanganan proyek tak terganggu gempa

Judul	Jasa Marga Targetkan Tambah 200 KM Tol Baru	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 9)		
Resume	Pengembangan infrastruktur untuk menguatkan konektivitas jalur logistik		

JASA MARGA TARGETKAN TAMBAH 200 KILOMETER TOL BARU

Hingga semester pertama 2018, konsesi yang didapat Jasa Marga mencapai 1.527 kilometer, 776,7 kilometer di antaranya sudah beroperasi.

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus melangkah dalam pengembangan infrastruktur, khususnya jalan tol. Berbagai pencapaian pun telah diraih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target pembangunan 1.000 kilometer jalan tol baru.

Hingga semester pertama 2018, konsesi yang didapatkan Jasa Marga telah mencapai 1.527 kilometer, termasuk 776,7 kilometer sudah beroperasi. "Sekarang sudah 787 kilometer, kemudian sisanya sampai akhir tahun tambahannya kira-kira 200 kilometer lagi. Prinsipnya Trans Jawa selesai," kata Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani di kantor pusat Jasa Marga, Kamis, 9 Agustus 2018.

Desi memaparkan *market share* Jasa Marga mencapai 65 persen dari sisi operasi dan 80 persen



▲ Tol Semarang - Salatiga.

dari sisi transaksi. Selain itu, berdasarkan *rating* Moody's, Jasa Marga menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah di pasar global (Global IDR Bond) atau disebut juga Komodo Bond. "Meski internasional, investornya mau mengambil risiko rupiah," ujar Desi.

Terkait dengan prospek

bisnis jalan tol di Indonesia, Desi menyampaikan pertumbuhan pembangunan jalan tol menjadi sangat dibutuhkan pada masa mendatang. Konektivitas antarwilayah menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan. Selain itu, bisnis infrastruktur lalu lintas transaksi yang dijalankan Jasa Marga akan terus meningkat. Bahkan, berdasarkan pengamatan dari tahun-tahun sebelumnya, pendapatan Jasa Marga tidak terpengaruh krisis ekonomi yang terjadi secara global.

Namun demikian, bidang usaha yang ditekuni Jasa Marga bukannya tanpa hambatan serta kendala dalam setiap pencapaiannya. Pada aspek pendanaan, kemampuan Jasa Marga mendanai setiap pembangunan jalan tol menjadi hal yang perlu dicermati. "Karena kami adalah Tbk, *covenant*-nya yang harus dijaga," tuturnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian di tengah peningkatan usaha Jasa Marga adalah terkait dengan permasalahan

operasional. Standar pelayanan harus terus mengalami peningkatan. Perawatan, perbaikan, maupun pembersihan adalah beberapa hal yang perlu mengalami improvisasi dengan berbagai kreativitas: "Banyak sekali yang perlu dilakukan supaya jalan kita selalu sesuai dengan standar pelayanan minimal," katanya.

Karena itu, BUMN ini terus berupaya memperbaiki diri. Faktor sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang menjadi pokok bahasan penting dalam

perbaikan ini. Peningkatan pendapatan yang dialami Jasa Marga menuntut adanya dorongan perubahan budaya kerja SDM yang ada. Secara internal, upaya perbaikan ini pun terus dilakukan, terutama dalam penerapan sejumlah tata nilai baru untuk mewujudkan visi-misi perusahaan.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Jasa Marga Kushartanto Koeswiranto menjelaskan, perbaikan itu diawali dengan proses internalisasi visi Jasa Marga menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, tepercaya, dan berkesinambungan. Karena itu, transformasi cara berpikir dan bekerja SDM yang ada penting untuk dilakukan. "Tanpa perubahan *mindset*, cita-cita ini tidak pernah bisa dilaksanakan," ujarnya.

Sejumlah tata nilai yang diterapkan kepada setiap karyawan Jasa Marga, antara lain *agility*, *professionalism*, *integrity*, juga *customer focus* (APIC). Memang tidak mudah mengubah sebuah budaya, tapi berbagai upaya terus dilakukan agar semua karyawan mampu menyadari, memahami, dan akhirnya menerima perubahan budaya kerja demi produktivitas yang semakin meningkat pada masa depan.

"Hitung-hitungan dan strategi bisa kita buat relatif tidak susah. Namun bagaimana semangat yang besar ini bisa kita gerakan dengan orang-orang yang *mindset*-nya berubah, itulah yang menjadi tantangan," kata Kushartanto. •TIM INFO TEMPO

Judul	Tahun Ini, Dua Jembatan Layang di Riau Rampung	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Saat ini tengah proses kontruksi		

Tahun Ini, Dua Jembatan Layang di Riau Rampung

PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau menyatakan optimistis dua *fly over* atau jembatan layang yang tengah dibangun di Kota Pekanbaru selesai tahun ini.

"Untuk Jembatan Layang Simpang Mal SKA sudah 41% dan yang di Pasar Pagi Arengka 31%. Kami optimistis siap akhir tahun," kata Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Riau Yusnan Aris di Pekanbaru, Senin (27/8).

Menurut dia, untuk yang di Mall SKA saat ini sedang mengerjakan pondasi, sementara untuk tiang pendukung sudah siap. Bahkan untuk balok penopang dari beton juga sudah datang dan telah berada di lokasi pekerjaan.

Sementara itu, untuk Jembatan Layang Simpang Pasar Pagi Arengka yang sudah selesai adalah tanjakannya. Sedangkan balok penopang besi dari Bukaka baru akan datang pada akhir September nanti.

"Balok besi itu nilai progresnya sudah 45%, kalau sampai naik progresnya jadi hampir 80%," imbuh dia.

Dia menuturkan, Jembatan Layang Pasar Pagi Arengka berbentuk belokan sehingga dipakai balok penopang dari besi. Pertimbangan teknisnya agar kaku sehingga bisa menahan beban. Jembatan layang pada Simpang Mall SKA dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau 2018 sebesar Rp 159,38 miliar lebih. Pengerjaan fisik proyek itu dengan panjang 625 meter, lebar 18 meter, dan empat lajur.

Sementara Jembatan Layang di Simpang Pasar Pagi Jalan Arengka, sepanjang 425 meter senilai Rp 78,3 miliar dari APBD 2018. Jembatan layang ini dikerjakan dengan lebar sembilan meter dan satu jalur dua lajur ini dibangun untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas dan mengurangi kemacetan pada jalur Arengka-Menuju Panam.

Pada bagian lain, progres

pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sudah mencapai sekitar 85%.

"Saat ini, pembangunan jembatan pada bentang panjang kemajuannya mencapai sekisar 85%," jelas kata Pejabat Bupati setempat Bere Ali saat meninjau lokasi proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang, pekan lalu.

Jembatan penghubung sepanjang 804 meter itu ditargetkan rampung November 2019, yakni untuk pembangunan jembatan pada bentang pendek sudah selesai pada 2015 dengan menggunakan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 425 miliar.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan pada bentang panjang menggunakan anggaran dari APBN senilai Rp 1,3 triliun, yang dibayar dengan pola kontrak tahun jamak (*multiyears contract*). (tm/ant)

Judul	PUPR Susun Draf SPAM Regional Jatigede Rp 4 T	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 6)		
Resume	Dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha		

PUPR Susun Draf SPAM Regional Jatigede Rp 4 T

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede yang ditaksir senilai Rp 4 triliun. Proyek infrastruktur air ini akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBUs).

Anggota Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Unsur Profesi Poppy Indrawati Janto mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah memfasilitasi penyusunan kajian awal prastudi kelayakan atau *outline business case* (OBC) KPBUs SPAM Regional Jatigede. Kajian ini ditargetkan dapat selesai pada akhir 2018.

"Kami berharap pada akhir tahun 2018, draf OBC KPBUs SPAM Regional Jatigede yang sudah dibuat dapat difinalkan dan diserahkan kepada penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) sehingga target pembangunan konstruksi SPAM Jatigede pada tahun 2020 dapat terpenuhi," ujar Poppy dalam siaran resminya di Jakarta, Senin (27/8).

Poppy menambahkan, draf

OBC KPBUs SPAM Regional Jatigede nantinya akan dibahas bersama dengan pemerintah daerah (pemda), perusahaan daerah air minum (PDAM), serta pemangku kepentingan terkait untuk disempurnakan serta difinalkan pada akhir tahun 2018. Selanjutnya, draf tersebut akan diserahkan kepada penanggung jawab proyek kerjasama SPAM Jatigede.

Lebih lanjut Poppy mengungkapkan, percepatan pembangunan proyek KPBUs SPAM Regional Jatigede perlu didukung dengan adanya kerja sama yang sinergis antara PDAM, pemangku kepentingan terkait serta Pemda Jawa Barat sebagai pihak yang mengusulkan pembangunan SPAM Regional Jatigede. Untuk itu, Poppy mendorong Pemda Jawa Barat dapat segera mempercepat proses penunjukan PJPK SPAM Regional Jatigede, sehingga proses koordinasi antar pemangku kepentingan terkait berjalan lancar.

Proyek SPAM Regional Jatigede ditargetkan dapat memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dan industri yang ada di daerah Sumedang, Majalengka, Indramayu,

dan Cirebon. SPAM dengan kapasitas 3500 liter/detik ini direncanakan akan dibangun melalui dua tahap dan ditaksir membutuhkan dana investasi sebesar Rp 4 triliun.

Waduk Jatigede yang merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Waduk Jatiluhur dengan kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik (m³), saat ini sudah beroperasi penuh dan manfaatnya mulai dirasakan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, keberadaan Waduk Jatigede sangat diharapkan masyarakat khususnya di Pantura Jawa seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Sumedang untuk irigasi, pengendali banjir, pembangkit listrik, dan air baku masyarakat.

Seluruh fungsi dari Waduk Jatigede sudah berjalan secara optimal sesuai rencana pembangunan. Selain untuk keperluan irigasi, juga untuk kebutuhan air baku sebesar 3.500 liter per detik. Selain itu akan menjadi penghasil listrik sebesar 110 megawatt (MW) yang saat ini dalam tahap pembangunan. (ean)

Judul	Bappenas: Penegakan Hukum Tak Mengganggu Proyek Infrastruktur	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 21)		
Resume	Pelaksanaan proyek berlangsung terus		

Bappenas: Penegakan Hukum TKDN Tak Mengganggu Proyek Infrastruktur

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan penegakan hukum (law enforcement) penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur terutama proyek strategis nasional (PSN).

"PSN tetap jalan, karena PSN itu proyek-proyek yang sudah dimulai dibuat dan dikonstruksi pada triwulan I dan triwulan II tahun depan. Jadi tidak ada halangan mengenai PSN" ujar Bambang, Senin (27/8).

Menurutnya, yang paling penting bukanlah memilah PSN-nya namun lebih kepada penegakan hukum (law enforcement) dari penerapan TKDN. Pasalnya, masih banyak proyek atau aktivitas yang TKDN masih dibawah yang di syaratkan, sehingga memang harus diperbaiki enforcementnya.

"Intinya kita berbicara mengenai bagaimana proyek infrastruktur yang sebenarnya, karena kita kan tetap butuh penyelesaian infrastruktur, karena infrastruktur memang dibutuhkan, sehingga jangan sampai penyelesaian infrastruktur bisa mengganggu keseimbangan eksternal", kata dia.

Bambang mengungkapkan bahwa jenis proyek TKDN yang dibawah persyaratan salah satunya pembangkit listrik, tapi untuk transmisi distribusi

listrik sudah memenuhi syarat TKDN.

Lebih lanjut, ia mengaku optimistis mengerem proyek-proyek infrastruktur yang tidak memenuhi syarat TKDN, sehingga pemerintah mampu mengurangi defisit transaksi berjalan pada tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menerapkan expenditure switching policy atau pengalihan belanja barang yang biasa impor menjadi barang yang berasal dari dalam negeri, diantaranya adanya aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), salah satunya PLN.

"PLN termasuk yang menggunakan banyak sekali barang modal dan sebetulnya mereka sudah memiliki policy TKDN, tapi penggunaan komponen dalam negeri selama ini masih belum dipenuhi. Oleh karena itu menjadi salah satu yang dilakukan dalam jangka pendek," kata Menkeu.

Adapun selama kuartal II-2018, CAD mencapai US\$ 8 miliar atau 3% terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar US\$ 5,7 miliar atau 2,2% terhadap PDB. Untuk neraca transaksi berjalan 2019 diperkirakan masih mengalami defisit di kisaran 2,5-3% dari PDB yang didorong oleh langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan impor. (try)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 16)		
Resume	Pengerjaan Jembatan Kenteng yang memiliki panjang 490 meter dan tinggi 39 meter di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/8)		

Pengerjaan Jembatan Kenteng



KOMPAS/FEBGANATA DEDGA RIATMOKO

Pengerjaan Jembatan Kenteng yang memiliki panjang 490 meter dan tinggi 39 meter di ruas Tol Salatiga-Solo di Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/8/2018), terus berlanjut.

Judul	Asuransi Bencana Alam untuk Rumah	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 15)		
Resume	Kementerian PUPR masih melakukan verifikasi rumah yang rusak		

Asuransi Bencana Alam untuk Rumah

Kementerian PUPR masih terus memverifikasi jumlah rumah yang rusak. Saat ini jumlahnya terus bertambah hingga sekitar 115 ribu unit.

PUPUT MUTIARA

puput.mutara@mediaindonesia.com

BENCANA gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya berdampak pada bangunan rumah. Perusahaan asuransi akan bertanggung jawab terhadap rekonstruksi bangunan rumah yang mengalami kerusakan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Real estat Indonesia Totok Lusida menekankan bahwa pihak asuransi dalam hal ini Askrindo dan

Jamkrindo hanya memberikan jaminan terhadap rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tipe 36 ke bawah yang tergolong sederhana.

"Kalau rumah MBR yang asuransi BUMN, negara, jadi sudah terjamin dan pasti aman. Kalau yang non-MBR asuransinya kan macam-macam. Tapi kami harap *end-user* tetap tenang dan jangan khawatir," ucapnya saat dihubungi *Media Indonesia*, kemarin.

Apalagi, menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan, perihal angsuran dan bunga untuk sementara dibentkan. Ia meya-

kini tidak semua struktur perumahan pecah karena banyak yang sudah memakai besi ton berdiameter 10 mm. Dengan struktur demikian, konstruksi rumah tidak bermasalah meskipun dihantam gempa 7 skala *Richter*.

Hasil penelitian sementara yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak dua pekan terakhir memperlihatkan pembangunan beberapa rumah masih dapat diteruskan. Sebagian yang lain harus dibongkar untuk kemudian dibangun kembali dari awal.

"Ini pun masih diteliti satu per satu. Pihak asuransi belum memastikan karena gempa masih ada terus sehingga perlu penelitian berulang-ulang," imbuh Totok. Begitu juga dengan rencana waktu pembangunan ulang alias rekonstruksi, ini tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat.

Berbeda

Yang menarik, ada pernyataan berbeda tentang asuransi bencana alam terhadap rumah MBR. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, pada Kamis (23/8), selama ini asuransi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk MBR atau bersubsidi belum memberi perlindungan terhadap rumah yang terkena bencana alam. Asuransi KPR bersubsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit.

"Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan bencana alam dan dampaknya pada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawaban," tuturnya.

Disisi lain, Kementerian PUPR masih terus memverifikasi jum-

lah rumah yang rusak.

"Semula data awal ada sekitar 70 ribu rumah yang rusak. Saat ini ternyata jumlahnya bertambah hingga sekitar 115 ribu unit," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, kemarin.

Kementerian PUPR menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascagempa di NTB dan sekitarnya dapat dituntaskan dalam jangka waktu sekitar setahun ke depan.

Target itu diyakini Danis tercapai karena teknologi yang digunakan yaitu Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Teknologi ini memanfaatkan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya bila dibandingkan dengan konstruksi rumah konvensional.

Selain itu, biayanya terjangkau, mudah dipindahkan, tahan gempa, dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.

"Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 meter persegi sekitar Rp1,5 juta, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp50 juta per rumah. Untuk komponen paling mahal, yakni besi dan semen akan dipasok BUMN," pungkas Danis. (Ant/S-4)

Judul	Memutus Derita Jakarta & Cikampek	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kemacetan yang menakutkan antara Jakarta-Bandung		

► TOL LAYANG DAN JALUR SELATAN

Memutus Derita Jakarta & Cikampek

Jarum jam menunjukkan pukul 23.00 WIB, Jumat, 11 Agustus 2018. Sudah 4 jam berlalu sejak minibus yang saya tumpangi bertolak dari kawasan Slipi, Jakarta Barat. Empat jam yang amat melelahkan karena kendaraan baru tiba di KM 19 jalan tol Jakarta—Cikampek. Dalam kondisi jalan lancar, 4 jam cukup sudah cukup mengantarkan saya tiba di Bandung atau Cirebon.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Dua lajur jalan tol seluruhnya padat. Bak sembahyang berjemaah, posisi truk, bus, dan kendaraan beragam tipe berbaris memanjang; terparkir menanti kendaraan yang ada di depannya melaju.

Kondisi jalan tol Jakarta—Cikampek saat ini seolah menjungkirbalikkan nalar. Sekitar 4 jam untuk jarak 30 kilometer menjadi ironis karena kemacetan ini terjadi di jalan tol alias jalan bebas hambatan.

Secara kasat mata, kemacetan tidak bisa dihindarkan. Lajur jalan menyempit karena ada pekerjaan konstruksi jalan tol layang di median maupun bahu jalan sepanjang 38,60 kilometer.

Inilah proyek Jakarta—Cikampek II Elevated atau biasa disingkat Japek Elevated. Sejak 2015, sebagian segmen jalan tol Jakarta—Cikampek juga terdendat karena ada konstruksi proyek kereta ringan atau *light rail transit* (LRT).

Tanpa proyek itu pun, sesungguhnya jalan tol Jakarta—Cikampek sudah sangat menderita. Kapasitas jalan tak lagi cukup menampung kendaraan yang melintas di jalur itu.

Menurut manajemen PT Jasa Marga

► Progres konstruksi Japek Elevated dengan per awal Agustus 2018 mencapai 42%.

► Untuk mengurangi kemacetan tol Jakarta—Cikampek, Jasa Marga merancang jalan tol lain.

Tbk. (JSMR), operator jalan tol Jakarta—Cikampek, nisbah volume dan kapasitas atau *volume/capacity* (VC Ratio) sudah mencapai 1,4 melampaui ambang batas normal 0,8.

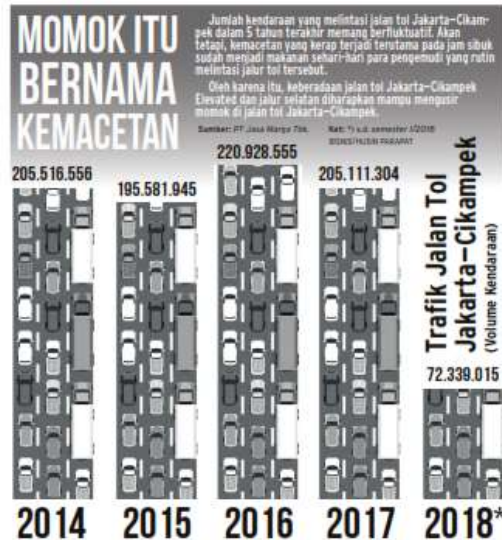
Kemacetan parah yang bisa merusak muruah jalan tol sebagai jalan bebas hambatan itu membuat Jasa Marga mengusulkan pembuatan jalan tol baru di atas jalan tol yang sudah ada.

Gayung bersambut, Badan Pengatur Jalan Tol memberi lampu hijau. Pada 2017, volume lalu lintas per tahun di jalan tol Jakarta—Cikampek tercatat 205,11 juta kendaraan. Angka ini memang turun karena puncak trafik di Jakarta—Cikampek terjadi pada 2016 dengan volume sebesar 220,94 juta kendaraan. Dengan kata lain, ada 605.311 kendaraan yang melintas di jalur ini setiap hari.

Berdasarkan data volume lalu lintas jalan tol yang dikutip dari laman resmi Jasa Marga, pada 2010, volume kendaraan di jalan tol Jakarta—Cikampek mencapai 132,60 juta atau 363.295 per hari. Maka, dalam 6 tahun saja, volume kendaraan sudah melesat hampir dua kali lipat.

Posisi jalan tol Jakarta—Cikampek memang sangat strategis karena menjadi kunci pergerakan kendaraan dari Jakarta menuju kota-kota di sebelah timur Jawa, mulai dari Bekasi, Karawang hingga Bandung. Setelah jalan tol Cikopo—Palimanan beroperasi pada 2015, jalan tol Jakarta—Cikampek juga menjadi penyambung arus kendaraan menuju kota-kota di Jawa Tengah.

Di luar itu, jalan tol Jakarta—Cikampek menjadi jalur vital bagi arus logistik karena berada di kawasan industri utama, yakni kawasan industri di Cikarang hingga Karawang. Oleh karena itu, ruas ini menjadi penyam-



bung hidup semua golongan kendaraan, mulai dari kendaraan pribadi hingga niaga dengan banyak sumbu.

Di tengah limpahan volume kendaraan, pembangunan jalan tol baru menjadi pilihan yang sulit ditolak. Jasa Marga melalui anak usahanya, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek sudah memulai konstruksi Japek Elevated dengan progres per awal Agustus 2018 mencapai 42%.

Japek Elevated menjadi proyek yang cukup monumental. Kepala BPTJ Herry Trisaputra Zuna menyebutkan bahwa proyek ini mendapat pinjaman sindikasi perbankan dan keuangan sebesar Rp11,36 triliun. Jumlah ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang PT Lintas Marga Sedaya. Operator jalan tol Cipali itu mendapat kucuran pinjaman sindikasi Rp8,80 triliun pada 2012.

Menurut Herry, jalan tol Japek II elevated dijadwalkan rampung pada Maret 2019 sehingga pada Lebaran 2019 bisa digunakan untuk melayani arus mudik. Walhasil, kemacetan

di jalan tol Jakarta—Cikampek bisa diatasi.

"Dari nilai pinjaman sudah memecahkan rekor. Dari sisi teknis juga. Jadi, silakan didaftarkan ke MURI [Museum Rekor Indonesia]," ujarnya. Bila telah rampung, jalan tol Jakarta—Cikampek akan mendapat tambahan empat lajur jalan tol baru. Walau demikian, penambahan jalur tersebut dinilai belum bisa mengatasi kemacetan sepenuhnya.

JAPEK SELATAN

Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Djoko Dwijono mengatakan bahwa Japek Elevated bisa menekan VC Ratio ke level 0,9 atau masih di atas ambang batas 0,8. "Untuk itu memang perlu Japek Selatan."

Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta—Cikampek, Jasa Marga memang merancang satu jalan tol lain, yakni Jakarta—Cikampek II Sisi Selatan atau Japek Selatan. Lewat anak usaha PT Jasamarga Japek Selatan, Jasa Marga akan membangun jalan tol baru

sepanjang 64 km, mulai dari Jatiasih hingga Sadang.

Direktur Keuangan & Administrasi PT Jasamarga Japek Selatan, I.B.K. Yudharta mengatakan bahwa konstruksi diharapkan bisa dimulai pada Desember 2018. Saat ini, perusahaan sudah membuka tender konstruksi dan pada saat yang bersamaan proses penentuan lokasi diharapkan bisa segera rampung.

Dari sisi pendanaan, PT Jasamarga Japek Selatan memproyeksi bisa menandatangani perjanjian kredit dengan bank pelat merah pada akhir Oktober 2019. Dengan asumsi total investasi Rp14,70 triliun, PT Jasamarga Japek Selatan diperkirakan bisa meraup pinjaman sebesar Rp10,29 triliun atau 70% dari investasi jalan tol.

Yudharta menjamin bahwa keberadaan jalan tol Japek Selatan akan membuat pengguna jalan lebih nyaman karena kendaraan dari arah Jakarta bisa langsung menembus Purwakarta, begitu pun sebaliknya.

Di samping itu, jalan tol Japek Selatan diperkirakan sepi dari truk yang melintas karena kendaraan niaga akan memilih jalan tol Jakarta—Cikampek.

"Nanti pengguna jalan bisa memilih [jalan tol yang mana], kami mencoba berkompetisi dengan memberi pelayanan yang baik," tuturnya.

Di lain pihak, pengguna jalan tol dari kalangan pengusaha truk menilai kehadiran dua jalan tol baru di Jakarta—Cikampek belum tentu meringankan kemacetan.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman mengatakan bahwa kendaraan logistik lebih membutuhkan jalan tol baru yang menjadi akses ke pelabuhan, yakni tol Cibitung—Cilincing.

Walaupun begitu, Kyatmadia berharap supaya kemacetan di jalan tol Jakarta—Cikampek bisa diatasi karena bagi pengusaha truk, kemacetan memberi beban ganda. Selain utilitas kendaraan rendah, kemacetan juga membuat konsumsi bahan bakar tidak efisien.

Bahkan, kemacetan yang terjadi di jalan tol Jakarta—Cikampek sudah membuat para pengemudi frustrasi.

Laksana penyakit, kemacetan di jalan tol yang membuat derita bagi banyak pihak memang harus segera diatasi, cepat atau lambat. Jangan sampai di jalan bebas hambatan, justru terjadi banyak hambatan. ■

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Warga menjaring ikan di Bendungan Sungai Sampean, Bondowoso, Jawa Timur, Senin (27/8)		

► DEBIT AIR MENURUN



Antara/Seno

Warga menjaring ikan di Bendungan Sungai Sampean Baru Desa Bunotan, Tapen, Bondowoso, Jawa Timur, Senin (27/8). Selama musim kemarau, daya tampung air Bendungan Sampean Baru turun dari

1,5 juta meter kubik menjadi 500.000 meter kubik, mengakibatkan distribusi air di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo menggunakan sistem gilir untuk lahan pertanian seluas sekitar 20 hektare.

Judul	Proyek Bendungan Tak Terganggu Gempa	Tanggal	Selasa, 28 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Penanganan proyek tak terganggu gempa		

► INFRASTRUKTUR LOMBOK

Proyek Bendungan Tak Terganggu Gempa

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan bahwa bencana gempa yang berulang kali mengguncang Nusa Tenggara Barat dalam sebulan terakhir tidak mengganggu pekerjaan konstruksi dan target penyelesaian proyek bendungan di wilayah itu.

Saat ini, terdapat dua proyek bendungan dalam konstruksi dan ditargetkan dapat diresmikan pada tahun ini. Kedua bendungan tersebut yakni Mila di Kabupaten Dompu dengan nilai investasi mencapai Rp404 miliar dan Bintang Bano di Sumbawa Barat dengan nilai investasi Rp996 miliar.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyatakan bahwa dalam aksi tanggap darurat yang dilakukan pihaknya untuk penanganan korban Lombok, kementerian juga mengecek kelangsungan proyek bendungan dan bendungan yang sudah ada di NTB untuk memastikan ketersedi-

aan air baku pascagempa di wilayah itu.

“Memang ada yang longsor sedikit, tetapi semua proyek bendungan aman dan masih jalan terus pembangunannya,” kata Danis saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (27/8).

Dia juga memastikan bahwa ketersediaan air masih tetap dipasok oleh bendungan yang ada di NTB. Saat ini, ada sembilan bendungan yang sudah berdiri di NTB, yakni Batujai, Mamak, Pengga, Tiu Kulit, Sumi, Gapit, Batu Bulan, Pelaperado, dan Pandan Duri.

Adapun, pada Juli 2018 satu bendungan juga baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo, yakni Tanju, ditargetkan mulai dapat mengairi sawah petani pada Februari 2019.

“Yang sudah selesai pembangunannya juga tidak apa-apa, kami cek aman semua,” jelasnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Bendungan Mila dan Bintang

Bano masuk dalam daftar sembilan bendungan yang ditargetkan rampung dan dapat diresmikan pada tahun ini.

“Progres Bendungan Mila sudah 82,30% dan ditargetkan rampung Desember 2018,” kata Basuki melalui siaran pers belum lama ini.

Selain kedua bendungan yang tengah dikonstruksi, Basuki menjelaskan bahwa bendungan lain di NTB yang pembangunannya ditargetkan dilaksanakan pada tahun ini ialah Beringin Sila dan Meninting.

Saat ini, pembangunan Beringin Sila masih dalam tahap mencari kontraktor pemenang lelang untuk membangun bendungan dengan perkiraan investasi Rp1,72 triliun tersebut.

Sementara itu, lelang Bendungan Meninting ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan selama 2015—2019. Jumlah tersebut

terdiri atas 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan.

Dari target 65 bendungan, 9 bendungan sudah rampung, 34 bendungan dalam tahap pelaksanaan, 14 bendungan akan dimulai tahun ini, dan 8 lainnya akan dikerjakan pada 2019.

Sementara itu, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5/2018, Danis mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat agar rehabilitasi fasilitas publik pada wilayah yang terdampak gempa dapat kembali bisa digunakan paling lambat pada Desember 2018.

Inpres tersebut mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan identifikasi awal, saat ini terdapat kerusakan pada 330 sekolah, 6 rumah ibadah, 118 rumah sakit/puskesmas/puskesmas, dan 22 pasar.

Adapun, rekonstruksi rumah masyarakat rencananya dimulai pada September. (Irene Agustine)